



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DPRD Minta DKI Segera Selesaikan Masalah RSUD Koja

Diusulkan masuk daftar hitam, kontraktor proyek menolak disalahkan sendirian.

Inge Klara Safitri

inge.klara@tempo.co.id

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mencari jalan keluar atas terhentinya pembangunan gedung Tower A Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI, Ramly Muhammad, mengatakan penghentian proyek itu telah mengganggu pelayanan rumah sakit.

Ramly mencontohkan, yang terganggu karena terhentinya pembangunan gedung baru antara lain layanan gawat darurat rumah sakit tersebut. Saat ini, instalasi gawat darurat (IGD) yang semula berada di lantai satu dipindah ke lantai dua. Sebab, ruang IGD lama yang sebetulnya lebih mudah diakses terkena dampak pembangunan gedung yang tak kunjung selesai. Di samping itu, menurut Ramly, kondisi lift menuju ruang IGD pun tidak memadai.

Ramly mengatakan telah meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melihat langsung kondisi rumah sakit pelat merah itu. “Supaya cepatlah diselesaikan,” kata dia, kemarin. Sebab, sudah banyak warga sekitar RSUD Koja yang mengeluhkan pelayanan di rumah sakit itu. “Di sini (pemerintah provinsi), kalau ditanya, jawabannya (karena masalah) lelang-lelang saja.”

Pembangunan gedung blok A RSUD Koja dihentikan pada Juni 2019. Pemerintah DKI menilai kontraktor tak mampu menyelesaikan pemba-

ngunan gedung 16 lantai berkapasitas 65 kamar rawat inap itu dalam tenggat yang disepakati. Proyek senilai 123 miliar itu sebelumnya ditargetkan rampung pada Desember 2018. Namun, hingga tahap evaluasi akhir pada 17 Juni lalu, kemajuan pembangunan RSUD Koja baru mencapai 67,07 persen. “Padahal sudah kami beri waktu tambahan 2x 90 hari,” kata Direktur RSUD Koja, Ida Bagus Nyoman Banjar.

Tak hanya menghentikan proyek, menurut Banjar, dia pun telah mengusulkan agar kontraktor proyek rumah sakit, PT Bangun Kharisma Prima, dimasukkan dalam daftar hitam atau *blacklist*. “Kami juga minta jaminan pelaksanaan proyek ditarik,” ujar dia.

Sebelumnya, Anies telah meminta Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi proyek pembangunan gedung baru RSUD Koja. Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Michael Rolandi, mengatakan lembaganya masih mengkaji dan mengevaluasi dugaan wanprestasi dalam proyek tersebut. “Sesuai arahan Pak Gubernur,” kata dia, Selasa lalu.

Inspektorat, menurut Michael, telah mengumpulkan keterangan dan data-data yang dibutuhkan. “Hasilnya belum,” ujar dia ketika ditanya ihwal temuan sementara Inspektorat.

Direktur Utama PT Bangun Kharisma Prima, Sunanto Santoso, menuturkan, dua hari lalu perusahaannya dipanggil Inspektorat. Mereka diminta memberikan klarifikasi mengenai laporan pejabat pembuat komitmen RSUD Koja dalam proyek terse-

but. “Saya sudah jelaskan semua, sebenar-benarnya, apa yang terjadi,” kata Sunanto kepada *Tempo*, kemarin.

Sunanto berharap Inspektorat bisa memahami duduk perkara proyek tersebut serta memberikan solusi terbaik. Ia pun mengatakan bersedia menyelesaikan proyek RSUD Koja jika masalah dan kendala yang ada disepakati untuk diselesaikan bersama. “Kami mau duduk bareng. Ayo membahas ini,” kata dia. “Karena masalahnya bukan hanya dari kami, jangan hanya kontraktor yang disalahkan.”

Sunanto mengklaim bukan perusahaannya yang menjadi biang keterlambatan pembangunan rumah sakit itu. Setelah memenangi tender pada April 2018, PT Bangun Kharisma Prima tak bisa langsung memulai pembangunan karena terganjal masalah penghapusan aset dan pembongkaran gedung lama. “Seharusnya, ketika kontrak ditandatangani, lahannya sudah *clean and clear*,” kata Sunanto lagi. ●

PT Bangun Kharisma Prima

Berdiri: 29 November 1997

Alamat: Jl. Pangeran Tubagus Angke No 97, Jakarta Barat, 11250

Proyek Tower A RSUD Koja

Tinggi bangunan: 16 lantai
Ruang rawat inap: 65 kamar
Fasilitas lain: 2 ruang operasi kanker dan sejumlah ruang poliklinik.

Proyek lain:

Proyek: Waktu Pengerjaan

- » Pengaspalan di lingkungan Markas Besar TNI Cilangkap: November 2019
- » *Pilot project* Hidran Mandiri: September 2019
- » Pembangunan gedung operasional kantor SAR Provinsi Jakarta: Juni 2016
- » Pembangunan mes dan GOR TNI AU di Halim, Jakarta Timur: Oktober 2015
- » Pembangunan rumah susun untuk Lokasi Binaan Semper: Agustus 2015
- » Pembangunan kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta: Oktober 2014
- » Rehabilitasi total gedung SMP Negeri 186, Jakarta Barat: Agustus 2013
- » Pembangunan Gedung Transjakarta (lanjutan): Juli 2013
- » Pembangunan Gedung Transjakarta: Juli 2012
- » Rehabilitasi SDN Pluit 03/04, Jakarta Utara: Juli 2011

● INGE KLARA SAFITRI

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DPRD Minta DKI Segera Selesaikan Masalah RSUD Koja

Hikayat Pemain Lama

PT Bangun Kharisma Prima (BKP) bukan pendatang baru dalam bursa proyek di lingkungan pemerintah DKI Jakarta. Perusahaan ini telah berkali-kali mengerjakan proyek yang dibiayai anggaran daerah. Terakhir, PT BKP memenangi lelang proyek tower blok A di RSUD Koja. Proyek senilai Rp 123 miliar tersebut awalnya ditargetkan rampung pada akhir 2018. Namun, sampai dihentikan pada Juni 2019, pengerjaan proyek baru kelar 67 persen.

2018

Februari	April	Mei	Juli	Agustus	September	Desember
Proses lelang dimulai. Dalam proyek ini, lelang <i>design and build</i> diterapkan.	PT Bangun Kharisma Prima (BKP) ditetapkan sebagai pemenang lelang. Kontrak diteken bersamaan dengan terbitnya surat perintah mulai kerja. Namun PT BKP belum bisa mengerjakan proyek karena tertinggal bangunan lama dan proses penghapusan aset.	Pemenang lelang untuk merobohkan gedung lama (empat lantai) ditetapkan. Jasa bongkar gedung perorangan itu diberi waktu 30 hari.	Pembongkaran gedung lama belum selesai, tapi PT BKP sudah menandatangani serah-terima lahan.	Akhirnya pembongkaran gedung selesai. PT BKP mulai membangun fondasi, namun sempat terhambat fondasi lama yang tak dibongkar.	PT BKP mulai bekerja, sambil diminta mengurus izin mendirikan bangunan.	Pemerintah DKI menutup anggaran pada 19 Desember 2018. Pembangunan baru 30 persen. PT BKP diberi waktu tambahan 90 hari kerja tanpa denda.

2019

Januari	Maret	Juni	Juli
PT BKP dipanggil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bersama Sekretaris Daerah dan Inspektorat DKI untuk membahas keterlambatan serta kelanjutan proyek. Surat kesepakatan melanjutkan proyek dengan sistem pendanaan baru diteken.	Hasil evaluasi menunjukkan kemajuan proyek baru 57 persen. PT BKP kembali diberi waktu tambahan 90 hari kerja dengan denda satu permil per hari dari nilai kontrak.	Pembangunan baru mencapai 67 persen dan diputuskan untuk dihentikan.	Inspektorat Provinsi DKI mengevaluasi dan mengkaji proyek RSUD Koja.